BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2016

T E N T A N G

PENETAPAN BESARAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 198 dan pasal 210 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan dana Tahun Anggaran berjalan maka perlu menetapkan besaran Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN BESARAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

2. Anggaran .....

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun.

3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

4. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.

5. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.

7. Bendahara pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.

8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPK.

9. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Surat Penyediaan Dana selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

12. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

13. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

14. SPP .....

14. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambah uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPK yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan Pembayaran Langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumen disiapkan oleh PPTK.

16. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang di gunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa penggunaan anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK.

17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya di singkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN

Pasal 2

(1) Penanggung jawab pengelolaan belanja daerah SKPK adalah kepala SKPK selaku pengguna anggaran/pengguna barang SKPK.

(2) Kepala SKPK selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas usulan, pelaksanaan, pengendalian dan laporan keuangan belanja daerah SKPK yang dipimpinnya.

BAB III

BATAS JUMLAH PENGAJUAN SPP-UP DAN SPP-GU

Pasal 3

(1) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP Uang Persediaan (UP) setiap awal Tahun Anggaran setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati ini.

(2) SPP-UP dipergunakan untuk mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPK dan Pengajuannya hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan

(3) Jumlah.....

(3) Jumlah Perhitungan Uang Persediaan (PUP) adalah Pagu Anggaran per Tahun (PAT) tidak termasuk Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Modal (BM) dengan formulasi sebagai berikut :

PUP= PAT – BTL – BM

Keterangan :
PUP = Perhitungan Uang Persediaan
PAT = Pagu Anggaran per Tahun
BM = Belanja Modal
BTL = Belanja Tidak Langsung

(4) Tarif Uang Persediaan (TUP) ditentukan berdasarkan hasil pengurangan Perhitungan Uang Persediaan (PUP) dibagikan 12 bulan apabila pengesahan APBK disetujui Sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

(5) Jumlah Uang Persediaan (UP) tidak berlaku untuk :
a. Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan antara lain untuk gaji dan tunjangan pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga serta Pengeluaran Pembiayaan.
b. Belanja Langsung untuk Belanja Modal diatas Rp. 5.000.000,-

(6) Jumlah Uang Persediaan (UP) maksimal untuk pengajuan SPP-UP dihitung dengan membagikan jumlah Perhitungan Uang Persediaan (PUP) dengan Tarif Uang Persediaan (TUP) atau dengan formulasi sebagai berikut :

UP = PUP ÷ TUP

Keterangan :
UP = Uang Persediaan
PUP = Perhitungan Uang Persediaan
TUP = Tarif Uang Persediaan

(7) Batas maksimal jumlah dana untuk pengajuan SPP-GU setelah dipertanggungjawabkan minimal 60% dari jumlah SPP-UP.

(8) Belanja PPKD atau Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Hibah dan Belanja Tak Terduga dilakukan dengan sistem Pembayaran Langsung (LS).

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN SPP-UP DAN SPP-GU

Pasal 4

(1) SPP-UP dan SPP-GU diajukan setelah ditetapkan APBK.
(2) Berdasarkan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-UP dan SPP-GU sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(3) SPP-UPP.....

(3) SPP-UP dan SPP-GU diajukan berdasarkan alokasi dana dan waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPK.

Pasal 5

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPK dalam rangka pengisian Uang Persediaan (UP).

(2) Dokumen SPP-UP meliputi:
a. Surat Pengantar SPP-UP
b. Ringkasan SPP-UP
c. Rincian SPP-UP
d. Salinan SPD, dan
e. Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada BUD/kuasa BUD.

Pasal 6

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPK dalam rangka pengisian ganti uang persediaan.

(2) Dokumen SPP-GU meliputi:
a. Surat Pengantar SPP-GU
b. Ringkasan SPP-GU
c. Rincian SPP-GU
d. Salinan SPD
e. Surat Pengesahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas pengunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya, salinan SPD, dan
f. Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada BUD/Kuasa BUD.

Pasal 7

(1) PPK-SKPK melaksanakan fungsi tata usaha keuangan atas pengajuan dokumen SPP-UP dan SPP-GU oleh bendahara pengeluaran.

(2) PPK-SKPK dalam melaksanakan fungsi tata usaha keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
b. Meneliti kelengkapan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
c. Melakukan Verifikasi SPP
d. Menyiapkan SPM
e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan

f. Melaksanakan.....

f. Melaksanakan Akuntansi, dan
g. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPK.

Pasal 8

Setelah PPK-SKPK meneliti kelengkapan dan kesesuaian dokumen SPP-UP dan SPP-GU, PPK-SKPK menyiapkan dan mengajukan kepada kepala SKPK selaku pengguna anggaran untuk ditertibkan SPM-UP dan SPM-GU.

Pasal 9

SPM-UP dan SPM-GU yang telah diterbitkan diajukan ke PPKD (Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) selaku BUD.

BAB V

PENUTUP

Pasal 10

Uraian lebih lanjut tentang besaran Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2016, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue,
Pada tanggal : 2 Januari 2016 M
21 Rabiul Awal 1437 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 4 Januari 2016 M
23 Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI, TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016 NOMOR : 83

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2016
TANGGAL : 2 JANUARI 2016
TENTANG : PENETAPAN BESARAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2016.....

NO	NAMA SKPK	PAGU ANGGARAN (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN (Rp)	TARIF UANG PERSEDIAAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	KETERAN
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4 - 5	7 = 12 bulan	8	9
1	DINAS PENDIDIKAN	262,564,875,384	215,624,130,376	32,414,140,861	14,526,604,147	12	910,550,346	
2	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 BEUTONG)	2,054,016,823	1,780,164,543	-	273,852,280	12	22,821,023	
3	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 SEUNAGAN)	3,314,350,440	2,997,296,640	-	317,053,800	12	26,421,150	
4	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 SEUNAGAN)	2,132,158,601	1,944,616,592	-	187,542,009	12	15,628,501	
5	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 KUALA)	2,731,492,799	2,573,232,799	-	158,260,000	12	13,188,333	
6	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 KUALA)	2,291,364,395	2,110,134,395	-	181,230,000	12	15,102,500	
7	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 3 KUALA)	2,043,797,658	1,865,031,758	-	178,765,900	12	14,897,158	
8	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 4 KUALA)	1,324,614,909	1,169,099,909	-	155,515,000	12	12,959,583	
9	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 DARUL MAKMUR)	2,122,498,695	1,862,731,195	-	259,767,500	12	21,647,292	
10	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 DARUL MAKMUR)	1,919,599,723	1,680,594,723	-	239,005,000	12	19,917,083	
11	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 BEUTONG)	2,033,220,374	1,752,350,673	-	280,869,701	12	23,405,808	
12	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 BEUTONG)	1,640,345,694	1,434,871,894	-	205,473,800	12	17,122,817	
13	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 BEUTONG)	870,395,340	692,371,644	-	178,023,696	12	14,835,308	
14	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 SEUNAGAN)	2,865,080,487	2,637,387,247	-	227,693,240	12	18,974,437	
15	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 SEUNAGAN)	2,487,088,449	2,360,861,178	-	126,227,271	12	10,518,939	
16	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 SEUNAGAN)	2,055,964,993	1,859,224,993	-	196,740,000	12	16,395,000	
17	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 SEUNAGAN)	2,438,571,555	2,223,956,555	-	214,615,000	12	17,884,583	
18	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 5 SEUNAGAN)	2,169,340,651	1,946,361,146	-	222,979,505	12	18,581,625	
19	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 KUALA)	2,285,956,136	2,102,438,136	-	183,518,000	12	15,293,167	
20	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 KUALA)	2,511,822,200	2,262,276,200	-	249,546,000	12	20,795,500	
21	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 KUALA)	1,321,757,379	1,204,862,379	-	116,895,000	12	9,741,250	
22	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 KUALA)	890,122,267	754,317,267	-	135,805,000	12	11,317,083	

NO	NAMA SKPK	PAGU ANGGARAN (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN (Rp)	TARIF UANG PERSEDIAAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4 - 5	7 = 12 bulan	8	9
23	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 5 KUALA)	1,007,697,623	847,112,623	-	160,585,000	12	13,382,083	
24	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 6 KUALA)	1,482,753,798	1,317,724,463	-	165,029,335	12	13,752,445	
25	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 7 KUALA)	1,074,622,120	925,875,310	-	148,746,810	12	12,395,568	
26	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 8 KUALA)	1,167,311,742	1,033,971,742	-	133,340,000	12	11,111,667	
27	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 DARUL MAKMUR)	2,268,464,636	1,949,515,636	-	318,949,000	12	26,579,083	
28	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 DARUL MAKMUR)	1,907,831,076	1,672,694,076	-	235,137,000	12	19,594,750	
29	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 DARUL MAKMUR)	937,393,635	715,763,635	-	221,630,000	12	18,469,167	
30	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 DARUL MAKMUR)	1,000,282,850	833,903,650	-	166,379,200	12	13,864,933	
31	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 5 DARUL MAKMUR)	673,753,062	506,318,062	-	167,435,000	12	13,952,917	
32	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 6 DARUL MAKMUR)	1,200,957,134	1,037,279,924	-	163,677,210	12	13,639,768	
33	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 7 DARUL MAKMUR)	686,755,811	530,554,811	-	156,201,000	12	13,016,750	
34	Dinas Pendidikan (SMK NEGERI 1 NAGAN RAYA)	2,309,106,890	1,846,894,655	86,000,000	376,212,235	12	31,351,020	
35	Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN SEUNAGAN)	786,272,534	443,927,534	34,500,000	307,845,000	12	25,653,750	
36	Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN KUALA)	576,765,502	429,715,502	-	147,050,000	12	12,254,167	
37	Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN DARUL MAKMUR)	656,344,479	428,474,479	85,000,000	142,870,000	12	11,905,833	
38	Dinas Pendidikan (UPTD - SKB DINAS PENDIDIKAN)	1,757,399,433	1,284,981,933	32,050,000	440,367,500	12	36,697,292	
39	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 9 KUALA)	626,763,820	495,729,170	-	131,034,650	12	10,919,554	
40	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 10 KUALA)	840,694,033	706,409,033	-	134,285,000	12	11,190,417	
41	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI BUNGA BANGSA)	1,090,025,937	907,477,937	-	182,548,000	12	15,212,333	
42	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 3 DARUL MAKMUR)	759,414,355	588,696,375	-	170,717,980	12	14,226,498	
43	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI BUNGA BANGSA)	800,098,150	629,165,210	-	170,932,940	12	14,244,412	
44	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI BEUTONG ATEUH)	580,359,198	378,309,183	-	202,050,015	12	16,837,501	
45	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 BEUTONG)	1,263,750,887	1,085,034,093	-	178,716,794	12	14,893,066	
46	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 6 SEUNAGAN)	1,173,798,298	1,004,708,188	5,000,000	164,090,110	12	13,674,176	
47	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 11 KUALA)	633,615,142	473,939,042	-	159,676,100	12	13,306,342	
48	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 8 DARUL MAKMUR)	466,183,814	320,228,814	-	145,955,000	12	12,162,917	

NO	NAMA SKPK	PAGU ANGGARAN (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN (Rp)	TARIF UANG PERSEDIAAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	KETERANGA
1	2	3	4	5	6 =3 -4 -5	7 12 bulan	8	9
49	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 9 DARUL MAKMUR)	326,861,343	197,063,203	-	129,798,140	12	10,816,512	
50	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 10 DARUL MAKMUR)	337,117,688	209,595,728	-	127,521,960	12	10,626,830	
51	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 3 SEUNAGAN)	1,935,968,106	1,756,605,126	-	179,362,980	12	14,946,915	
52	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 5 DARUL MAKMUR)	810,489,880	654,429,880	-	156,060,000	12	13,005,000	
53	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 6 DARUL MAKMUR)	870,693,710	676,385,710	-	194,308,000	12	16,192,333	
54	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 SUKA MAKMUE)	1,298,593,945	1,172,123,945	-	126,470,000	12	10,539,167	
55	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 TADU RAYA)	922,390,201	793,268,201	-	129,122,000	12	10,760,167	
56	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 BEUTONG)	535,575,329	378,890,329	-	156,685,000	12	13,057,083	
57	Dinas Pendidikan (SMKN 1 KUALA PESISIR)	1,095,978,484	534,661,510	147,800,000	413,516,974	12	34,459,748	
58	DINAS KESEHATAN	56,285,416,630	3,722,593,685	37,000,555,945	15,562,267,000	12	363,855,583	
59	BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAGAN RAYA	57,931,777,338	10,786,414,730	16,192,218,608	30,953,144,000	12	490,428,667	
60	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS BEUTONG)	5,037,222,595	2,428,939,933	254,686,912	533,380,588	12	34,448,382	
61	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS UTEUN PULO)	5,778,092,675	2,954,114,095	226,832,680	607,380,300	12	40,615,025	
62	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS JEURAM)	7,417,169,855	4,574,938,835	128,532,360	918,299,200	12	56,524,933	
63	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS COT KUTA)	3,719,423,090	2,353,417,390	100,000,000	416,745,000	12	24,728,750	
64	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS UJONG FATIHAH)	5,633,699,073	2,919,292,347	208,247,619	355,702,381	12	20,641,865	
65	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS PADANG PANJANG)	4,697,045,885	2,405,217,785	116,500,000	1,086,948,052	12	50,579,004	
66	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS PADANG RUBEK)	2,563,693,343	1,543,876,345	66,000,000	175,018,048	12	14,584,837	
67	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS SUKA MULIA)	4,019,102,818	1,542,023,486	112,656,332	766,856,668	12	43,904,722	
68	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS SIMPANG JAYA)	3,379,549,971	1,886,492,971	5,400,000	487,657,000	12	30,638,083	
69	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS ALUE BILIE)	5,886,161,941	2,458,856,462	271,000,000	626,775,000	12	32,231,250	
70	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS ALUE RAMBOT)	3,148,041,053	1,002,471,137	46,662,349	944,073,291	12	58,672,774	
71	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS LUENG KEUBEU JAGAT)	2,117,251,441	969,964,338	22,800,000	470,218,000	12	30,184,833	
72	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS BEUTONG ATEUH)	1,687,918,892	649,582,932	153,000,000	486,703,000	12	30,558,583	
73	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS KUALA TADU)	1,592,955,087	528,760,841	123,100,000	941,094,246	13	42,391,865	
74	Dinas Kesehatan (Laboratorium Kesehatan Daerah)	883,861,042	289,453,042	194,500,000	399,908,000	14	28,564,857	

NO	NAMA SKPK	PAGU ANGGARAN (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN (Rp)	TARIF UANG PERSEDIAAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7 = 12 bulan	8 = 6 / 7	9
75	DINAS BINA MARGA	118,038,893,482	2,569,054,682	112,136,126,800	3,333,712,000	12	277,809,333	
76	DINAS PENGAIRAN	42,551,558,008	2,238,023,168	39,012,975,000	1,300,559,840	12	208,379,987	
77	DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN	111,180,409,000	2,260,242,988	106,621,963,012	2,298,203,000	12	291,516,917	
78	BAPPEDA	23,096,021,248	5,216,854,048	2,181,250,000	15,697,917,200	12	508,159,767	
79	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI	10,901,567,099	1,799,791,099	4,018,356,000	5,083,420,000	12	303,618,333	
80	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	23,476,117,029	1,630,335,029	11,791,940,000	10,053,842,000	12	387,820,167	
81	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,877,653,957	1,843,528,957	348,830,000	1,685,295,000	12	220,441,250	
82	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7,489,402,503	1,974,552,503	3,489,800,000	2,025,050,000	12	268,754,167	
83	DINAS SYARIAT ISLAM	8,674,251,509	2,033,303,009	149,000,000	6,491,948,500	12	360,995,708	
84	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4,572,883,652	1,504,083,652	804,000,000	2,264,800,000	12	228,733,333	
85	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERKOPERASIAN	10,736,642,205	2,669,152,205	4,604,710,000	3,462,780,000	12	248,565,000	
86	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	15,325,618,476	2,006,142,976	5,691,150,000	7,628,325,500	12	302,693,792	
87	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, WILAYATUL HISBAH DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6,384,932,275	1,552,659,275	120,000,000	4,712,273,000	12	252,689,417	
88	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3,178,110,858	672,286,358	83,000,000	2,422,824,500	12	212,902,042	
89	DPRK NAGAN RAYA	5,890,098,728	5,890,098,728	-	-	-	-	LS
90	KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH	590,848,643	590,848,643	-	-	-	-	LS
91	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	49,100,670,997	10,595,923,472	6,554,630,000	31,950,117,525	12	1,662,509,794	
92	SEKRETARIAT DPRK	19,658,046,612	2,797,196,812	330,600,000	16,530,249,800	12	1,577,520,817	
93	DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH :							
	- BELANJA SKPK	38,179,379,324	9,298,988,324	6,776,350,000	22,104,041,000	12	1,042,003,417	
	- BELANJA PPKD	234,073,149,880	234,073,149,880	-	-	-	-	LS
94	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN NAGAN RAYA	1,669,193,996	436,133,996	90,000,000	1,143,060,000	12	85,255,000	
95	INSPEKTORAT	6,121,176,336	2,355,330,836	54,000,000	3,711,845,500	12	289,320,458	
96	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN NAGAN RAYA	1,532,788,480	348,058,480	25,750,000	1,158,980,000	12	60,581,667	
97	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA	948,282,294	304,201,294	23,700,000	620,381,000	12	51,698,417	
98	SEKRETARIAT MAJELIS BAITUL MAL KABUPATEN NAGAN RAYA	7,451,083,294	528,037,294	32,000,000	6,891,046,000	12	116,253,833	

NO	NAMA SKPK	PAGU ANGGARAN (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN (Rp)	TARIF UANG PERSEDIAAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4 - 5	7 = 12 bulan	8	9
99	KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG	2,271,450,563	1,420,001,563	87,300,000	764,149,000	12	63,679,083	
100	KECAMATAN TRIPA MAKMUR	2,164,926,160	1,116,426,160	304,400,000	744,100,000	12	62,008,333	
101	KECAMATAN BEUTONG	4,126,130,277	2,691,289,527	285,860,000	1,148,980,750	12	95,748,396	
102	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR	4,764,313,118	3,354,633,118	139,200,000	1,270,480,000	12	105,873,333	
103	KECAMATAN SEUNAGAN	3,880,270,752	2,340,632,252	128,100,000	1,411,538,500	12	107,628,208	
104	KECAMATAN KUALA	3,383,531,714	2,298,126,714	362,800,000	722,605,000	12	60,217,083	
105	KECAMATAN DARUL MAKMUR	4,731,517,872	2,788,292,622	250,890,000	1,692,335,250	12	121,027,938	
106	KECAMATAN SUKA MAKMUE	2,391,133,817	1,384,617,317	194,670,000	811,846,500	12	67,653,875	
107	KECAMATAN KUALA PESISIR	2,664,774,398	1,646,227,698	246,840,000	771,706,700	12	64,308,892	
108	KECAMATAN TADU RAYA	2,791,993,490	1,876,303,490	122,400,000	793,290,000	12	66,107,500	
109	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	4,053,509,631	1,858,834,631	149,000,000	2,045,675,000	12	190,472,917	
110	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN	8,739,581,720	3,153,599,720	367,414,000	5,218,568,000	12	314,880,667	
111	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK	1,092,831,180	484,670,680	36,318,000	571,842,500	12	37,653,542	
112	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	9,196,791,352	4,884,065,352	1,186,500,000	3,126,226,000	12	310,518,833	
113	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB	9,026,052,639	2,937,295,639	1,523,570,000	4,565,187,000	12	325,432,250	
114	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH DAN ARSIP	2,813,558,746	1,196,630,746	568,000,000	1,048,928,000	12	157,410,667	
115	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	15,618,535,253	2,893,854,253	5,651,390,000	7,073,291,000	12	349,440,917	
116	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	16,971,038,555	3,503,807,479	912,810,000	12,554,421,076	12	246,201,756	
117	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	8,310,085,260	1,768,102,745	4,118,472,515	2,423,510,000	12	250,959,167	
118	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12,955,441,267	2,609,800,567	4,024,879,000	6,320,761,700	12	285,730,142	
	JUMLAH	**1,390,355,149,975**	**670,017,341,289**	**413,628,127,993**	**288,902,570,897**		**15,461,420,777**	

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI